

# IMPLEMENTASI KERJA SAMA MARITIM INDONESIA-MOZAMBIK MELALUI “INDONESIA-AFRICA MARITIME DIALOGUE” TAHUN 2018-2024

Rona Ria Lianda Ompu Sunggu<sup>1</sup>, Enny Fathurachmi<sup>2</sup>

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Mulawarman

## Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi kerja sama maritim antara Indonesia dan Mozambik melalui forum *Indonesia-Africa Maritime Dialogue* (IAMD) sebagai strategi diplomasi maritim Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dan mengoptimalkan potensi sektor maritim. Kerja sama ini diawali dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2018 dan Rencana Aksi (*Plan of Action/PoA*) 2021–2024 yang mencakup tujuh bidang kolaborasi kerja sama maritim. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kerja sama masih belum optimal, di mana hanya empat dari tujuh ruang lingkup kerja sama yang telah dijalankan. Tantangan utama meliputi perbedaan regulasi, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kesadaran publik. Meskipun demikian, forum IAMD terbukti menjadi katalis penting bagi diplomasi maritim Indonesia di kawasan Afrika.

**Kata Kunci:** Kerja Sama Maritim, MoU Indonesia–Mozambik, IAMD, Tantangan Implementasi

## Abstract

*This study discusses the implementation of maritime cooperation between Indonesia and Mozambique through the Indonesia-Africa Maritime Dialogue (IAMD) forum as Indonesia's maritime diplomacy strategy to strengthen bilateral relations and optimize the maritime sector's potential. The cooperation was initiated through an MoU signed in 2018 and a Plan of Action (PoA) for 2021–2024 covering seven areas of collaboration. The study employs a qualitative descriptive method using library research for data collection. The findings reveal that the implementation remains suboptimal, with only four of the seven cooperation scopes executed. Main challenges include regulatory differences, limited infrastructure, and low public awareness. Nevertheless, the IAMD forum has proven to be a crucial catalyst for Indonesia's maritime diplomacy in the African region.*

**Keywords:** Maritime Cooperation, Maritime Diplomacy, MoU, IAMD, Implementation

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang luas mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> dengan 17.001 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 km. Kekayaan ini menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang

strategis, dengan potensi besar dalam sektor perikanan, energi laut, dan perdagangan. Namun, potensi besar ini juga dibayangi oleh persoalan kejahatan maritim seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran wilayah perairan yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Bakamla RI, pada periode 2015–2019 terjadi lebih dari 200 kasus tindak kejahatan maritim di Indonesia.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sektor maritim Indonesia belum optimal. Padahal, secara normatif Indonesia bercita-cita menjadi Poros Maritim Dunia sebagaimana tertuang dalam visi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta dalam RPJMN dan Perpres No. 16 Tahun 2017 dengan menjadi maritim sebagai salah satu prioritas arah kebijakan luar negeri Indonesia. Untuk mencapai visi ini, diperlukan kerja sama internasional yang tidak hanya memperkuat posisi Indonesia secara global, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi pembangunan sektor maritim nasional.

Salah satu bentuk konkret diplomasi maritim Indonesia adalah penyelenggaraan *Indonesia-Africa Maritime Dialogue* (IAMD) sejak tahun 2018. Melalui forum ini, Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan Mozambik, negara pesisir Afrika yang juga menjadikan sektor maritim sebagai prioritas pembangunan. Mozambik memiliki pelabuhan strategis seperti Maputo Port yang berperan penting sebagai jalur logistik regional Afrika Selatan. Kerja sama Indonesia-Mozambik mencakup pengembangan perikanan berkelanjutan, pemberantasan IUU *Fishing*, tata ruang laut, konservasi, dan peningkatan kapasitas SDM.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kerja sama maritim antara Indonesia dan Mozambik telah dilaksanakan sejak 2018. Fokus utamanya adalah sejauh mana isi dari ruang lingkup *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Plan of Action* (PoA) yang telah disepakati antara kedua negara mampu direalisasikan sesuai dengan tujuan awal kerja sama tersebut.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dan analisis faktual mengenai implementasi dari kerja sama maritim Indonesia-Mozambik melalui kerangka forum *Indonesia Africa Maritime Dialogue* dalam periode 2018-2024. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, dengan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan fokus penelitian adalah implementasi kerja sama berdasarkan dokumen MoU tahun 2018 dan PoA 2021–2024. Selanjutnya, lokasi penelitian ini dilakukan di dua negara, yaitu Indonesia dan Mozambik yang dapat dilihat dari implementasi yang dilakukan kedua negara melalui beberapa program kegiatan yang dilakukan di Indonesia dan Mozambik untuk mengembangkan potensi dan stabilitas kemaritiman.

### Landasan Konsep

#### Konsep Kerja Sama Maritim

Kerjasama maritim merupakan upaya kolaboratif yang dilakukan oleh negara-negara untuk mengatasi berbagai tantangan terkait domain kemaritiman, dengan saling mempromosikan keamanan untuk menjaga stabilitas global dan mengoptimalkan potensi maritim. Menurut O. Barrionuevo et al (2023) dalam buku yang berjudul *Developments and Advances in Defense and Security* pada sub bab *Maritime Strategy and Cooperative Security* menyatakan bahwa kerja sama maritim merupakan bagian strategi maritim negara yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan, dan memanfaatkan kekuatan maritim (*maritime power*) guna melindungi serta untuk mencapai kepentingan maritim nasional. Konsep ini kemudian termanifestasi dalam bentuk *cooperative maritime security*, yaitu kolaborasi lintas negara yang dibangun atas dasar kepentingan maritim bersama, penanggulangan ancaman bersama, serta penguatan stabilitas dan solidaritas kawasan maritim, baik melalui mekanisme bilateral, forum multilateral, maupun aliansi formal yang mendukung terciptanya keteraturan dan keamanan laut secara kolektif. Hal ini

menjadikan kerja maritim sebagai salah satu opsi bagi negara untuk mencapai kepentingan maritim yang dibangun melalui kolaborasi dengan saling berbagi informasi, baik itu di waktu normal maupun saat untuk mengatasi permasalahan maritim yang muncul.

Menurut Marry C. Lavissiere dan Laurent Fedi (2022) dalam jurnal *Maritime Cooperative Working Agreements* menyatakan bahwa kerjasama maritim dipahami sebagai bentuk kolaborasi antara pelaku industri maritim yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama (*Cooperative Working Agreements*) merupakan strategi negara dalam mencapai kepentingan nasional dengan menciptakan, memelihara, dan menggunakan kapasitas maritimnya sebagai alat untuk memajukan dan melindungi wilayah maritimnya. Oleh karena itu, adanya kerja sama maritim yang dilakukan suatu negara pada umumnya berangkat dari kondisi kemaritiman suatu negara yang didorong oleh permasalahan maritimnya, seperti dalam sektor keamanan, sektor ekonomi, maupun sektor lingkungan.

### **3. IMPLEMETASI KERJA SAMA MARITIM INDONESIA-MOZAMBIK MELALUI “INDONESIA-AFRICA MARITIME DIALOGUE” TAHUN 2018-2024**

#### **Kondisi Kemaritiman Indonesia**

Indonesia merupakan negara maritim terbesar, memiliki potensi kelautan yang melimpah namun menghadapi tantangan seperti *illegal fishing* dan infrastruktur yang kurang. Mozambik merupakan negara dengan kekayaan laut dan pelabuhan strategisnya juga memiliki permasalahan serupa. Oleh karena itu, kerja sama maritim antara kedua negara melalui forum *Indonesia-Africa Maritime Dialogue* (IAMD) menjadi suatu langkah strategis untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan, penguatan keamanan laut, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.

Kondisi maritim Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang menyimpan potensi sumber daya alam laut yang sangat melimpah, khususnya pada sektor perikanan, pariwisata bahari, dan industri kelautan (Nugroho et al., 2020). Namun, potensi besar ini dihadapkan pada tantangan signifikan, seperti

ancaman keamanan maritim, penangkapan ikan ilegal, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ekosistem laut. Tantangan ini menghambat upaya Indonesia untuk memaksimalkan potensi maritimnya. Tantangan ini menghambat upaya Indonesia untuk memaksimalkan potensi maritimnya. Dengan demikian, hal ini membutuhkan kebijakan kemaritiman yang komprehensif dan kerja sama internasional. Studi ini mengidentifikasi bahwa lemahnya infrastruktur dan regulasi menjadi penghambat utama, sebagaimana dikemukakan oleh Rahayu et al. (2024). Oleh karena itu, kolaborasi dengan negara lain, seperti Mozambik, menjadi solusi strategis untuk mengatasi tantangan ini.

Sumber daya alam laut Indonesia yang sangat melimpah, khususnya pada beberapa bidang seperti perikanan, keanekaragaman hayati laut dan wisata bahari, serta laut Indonesia yang menjadi salah satu jalur pusat perdagangan global. Indonesia memiliki potensi perikanan dunia, dengan produksi 22,18 juta ton pada 2022. Namun, budidaya menurun dari 16,115 juta ton di tahun 2017 ke 14,776 juta ton di tahun 2022, sementara pemanfaatan lahan laut baru 1,39%. Penurunan ini akibat penangkapan ilegal, teknologi terbatas, dan eksploitasi berlebihan, yang merugikan nelayan dan pendapatan negara. Upaya seperti diplomasi maritim dan kerja sama internasional diperlukan untuk pemulihan. Selain itu, sumber daya laut Indonesia seperti terumbu karang, mangrove, dan spesies langka mendukung pariwisata bahari senilai USD 21 miliar di tahun 2019, namun belum optimal karena dampak pandemi dan kerusakan ekosistem. Selanjutnya, di sektor jalur perdagangan maritim, 40% jalur perdagangan global melewati Indonesia, dan 95,4% ekspor USD 278,86 miliar pada 2022 dikirim lewat laut. Pemerintah merespons dengan tol laut, modernisasi pelabuhan, dan kerja sama teknologi, seperti dengan Mozambik.

### **Permasalahan Maritim di Indonesia dan Mozambik**

Indonesia sebagai negara maritim kaya potensi laut, menghadapi berbagai ancaman serius seperti *illegal fishing*, penyelundupan, dan perompakan. Tantangan ini diperburuk oleh lemahnya kualitas sumber daya

manusia, kebijakan maritim yang kurang efektif, dan keterbatasan infrastruktur serta anggaran untuk patroli rutin. Menurut data FAO 2019, IUU *Fishing* yang terjadi di kawasan global menyebabkan kerugian hingga USD 23 miliar per tahunnya dan di Indonesia sendiri, KKP mencatat lebih dari Rp 13 triliun kerugian akibat praktik IUU antara 2020–2025, dan periode Januari–Mei 2025 saja berhasil menyelamatkan Rp 774,3 miliar dengan menangkap 32 kapal pelaku tanpa izin.

Serupa dengan Indonesia, Mozambik juga mengalami peningkatan kejahatan maritim sejak 2014, terutama di Selat Mozambik dan Provinsi Cabo Delgado, termasuk pembajakan, IUU Fishing, dan penyelundupan. Kejahatan maritim yang kerap kali terjadi di Mozambik yakni pembajakan, *illegal fishing*, dan penyelundupan, yang diperparah oleh infrastruktur dan pengawasan laut yang minim sehingga menyebabkan penurunan hasil tangkapan. Kesamaan tantangan ini menempatkan kedua negara pada posisi yang sama dalam kebutuhan peningkatan kapasitas dan tata kelola kelautan berkelanjutan. Berdasarkan data nasional dari komunitas *Fish Forever in Mozambique* memperlihatkan adanya penurunan total tangkapan ikan hampir 30% dalam 25 tahun terakhir akibat eksploitasi berlebihan dan teknik merusak ekosistem laut. Meski demikian, upaya implementasi konservasi dan pengelolaan berbasis komunitas terus dijalankan.

Berdasarkan tantangan tersebut, Indonesia mempromosikan strategi maritim komprehensif melalui diplomasi dan kerja sama internasional, khususnya dengan negara-negara Afrika seperti Mozambik. Kolaborasi ini bertujuan mengoptimalkan sumber daya laut, menjaga keamanan, dan memperkuat konektivitas global, sejalan dengan prinsip pengelolaan laut sebagai *common property* yang membutuhkan tanggung jawab bersama, demi tata kelola laut yang berkelanjutan dan inklusif di tengah ancaman maritim global.

## **Analisis Hasil Implementasi Kerja Sama Maritim Indonesia-Mozambik**

### **Kerja Sama Maritim Indonesia-Mozambik**

Sejak Konferensi Asia-Afrika 1955, Indonesia telah aktif memperkuat hubungan dengan negara-negara Afrika, diwujudkan melalui berbagai forum seperti IAF, IAID, dan IAMD. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, fokus kerja sama semakin strategis pada sektor kemaritiman, khususnya melalui inisiatif *Indonesia-Africa Maritime Dialogue* (IAMD). Forum ini berfungsi sebagai platform vital untuk mempererat hubungan maritim, memfasilitasi pertukaran pengetahuan, dan mendorong kolaborasi pembangunan antara Indonesia dan negara-negara Afrika, termasuk Mozambik.

IAMD memainkan peran penting sebagai katalisator dalam menentukan arah kebijakan luar negeri maritim Indonesia, yang diperkuat dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2018 dan *Plan of Action* (PoA) pada tahun 2021. Perjanjian-perjanjian ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengelolaan sumber daya kelautan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, konservasi lingkungan laut, hingga penguatan keamanan maritim, dan menangani IUU *Fishing*. Kolaborasi ini merefleksikan komitmen kedua negara untuk mengatasi tantangan maritim yang serupa melalui pendekatan berbasis komunitas dan prinsip keberlanjutan.

Kerja sama antara Indonesia dan Mozambik ini menunjukkan bahwa diplomasi maritim dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan memperkuat kedaulatan di wilayah laut. Melalui sinergi dengan berbagi pengalaman, keahlian, dan teknologi yang dimiliki kedua belah pihak, Indonesia dan Mozambik berupaya mengoptimalkan potensi maritim mereka secara inklusif dan terstruktur. Inisiatif kerja sama ini juga menegaskan peran penting Indonesia sebagai aktor kunci dalam mendorong tata kelola maritim global yang lebih adil, berkelanjutan, dan adaptif terhadap berbagai tantangan geopolitik dan lingkungan yang terus berkembang.

#### a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Indonesia dan Mozambik telah menjalankan rangkaian pelatihan sebagai bagian dari MoU mereka, khususnya di bidang peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan laut, keamanan maritim, dan ekonomi berkelanjutan. Pelatihan ini mencakup kegiatan di dalam dan luar negeri, seperti pengiriman tenaga ahli Indonesia serta pelatihan teknis di bidang kemaritiman yang menegaskan komitmen kedua negara setelah diselenggarakannya forum IAMD sebagai katalisator hubungan bilateral.

Program penting yang telah terlaksana antara lain *Workshop on Integrated Fish Information System for Mozambique: Towards Responsible Fish Production* yang dilaksanakan pada 26–28 Nov 2019 di Maputo, Mozambik dan diikuti 12 peserta Mozambik dan satu alumni BSBI yang mengikuti pelatihan sistem informasi perikanan terpadu untuk mencegah *overfishing* serta merumuskan *roadmap* pengelolaan dan pengawasan perikanan. Selanjutnya, penyelenggaraan *International Fish Force Academy (IFFAI) Regional Training for Investigators and Prosecutors for African Countries* pada tanggal 22–28 Juli 2019 di Jakarta, Indonesia yang dihadiri oleh peserta dari Indonesia dan lima negara Afrika termasuk Mozambik, dengan fokus pada teknik investigasi dan penuntutan kasus IUU *Fishing*.

Implementasi program tersebut telah menghasilkan *roadmap* pengelolaan perikanan di Mozambik dan peningkatan kapabilitas penyidik serta jaksa dalam menindak kejahatan perikanan, menguatkan peran diplomasi maritim Joko Widodo dan langkah strategis KKP yang sejalan dengan diplomasi selatan-selatan Indonesia. Kapasitas SDM ini diharapkan menjadi fondasi bagi kerja sama maritim yang lebih struktur dan berkelanjutan, mendukung keamanan laut, tata kelola perikanan, serta pemberantasan IUU *fishing* di kawasan.

#### b. Pengembangan Perikanan dan Budidaya Berkelanjutan

Indonesia dan Mozambik sedang dalam tahap pertukaran informasi untuk mengembangkan perikanan dan budidaya berkelanjutan. Rencana aksi kerja sama ini berfokus pada peningkatan produksi perikanan tanpa merusak ekosistem laut. Implementasi ini tercermin dalam dua program pelatihan utama:

---

*Workshop on Integrated Fish Information System for Mozambique: Towards Responsible Fish Production* di Maputo dan *International Fish Force Academy of Indonesia (IFFAI) Regional Training for Investigators and Prosecutors for African Countries* di Jakarta. Kedua program ini menekankan praktik perikanan berkelanjutan, penguatan regulasi, dan pemantauan *IUU Fishing* untuk meningkatkan produktivitas dan mempromosikan praktik ramah lingkungan melalui pelatihan dan berbagi pengetahuan antara delegasi kedua negara, serta kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan, menyelenggarakan program pelatihan budidaya berkelanjutan "Budi Daya Nila dan Lele dari Hulu ke Hilir" di Bali pada 9 September 2024. Program ini didanai oleh Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional dan diikuti oleh 20 partisipan dari 10 negara Afrika, termasuk Mozambik.

Pelatihan ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan global dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program ini menjadi platform penting bagi Indonesia untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam budidaya dan pengolahan produk perikanan, mencakup materi dari kebijakan pengembangan SDM kelautan hingga teknik budidaya bioflok dan pengolahan hasil perikanan. Diharapkan, inisiatif ini dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan di negara-negara peserta serta memperkuat hubungan bilateral dan regional.

### **c. Pemberantasan IUU Fishing**

*Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* adalah masalah global yang merusak ekosistem laut, mengancam spesies ikan, dan berdampak negatif pada ekonomi lokal. Penanggulangan praktik ilegal ini memerlukan kerja sama internasional yang kuat. Kerja sama antara Indonesia dan Mozambik dalam memberantas *IUU Fishing* melibatkan pertukaran informasi dan teknologi untuk memperkuat penegakan hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan efektivitas penegakan hukum di perairan kedua negara, serta mengatasi praktik ilegal di tingkat global.

Indonesia dan Mozambik berkolaborasi dalam memerangi IUU Fishing melalui pertukaran informasi, pelatihan, dan pemanfaatan teknologi maritim. Implementasi kerja sama ini terlihat pada program seperti *International Fish Force Academy of Indonesia (IFFAI)* yang melatih aparat penegak hukum, dan *Workshop on Integrated Fish Information System for Mozambique* yang memfasilitasi pertukaran praktik terbaik dan teknologi pemantauan. Selain itu, partisipasi Indonesia dalam Konferensi Internasional *Blue Economy 2019* di Maputo menegaskan pentingnya sinergi kebijakan nasional dan internasional. Kerja sama ini bertujuan menjaga keberlanjutan ekosistem laut, meningkatkan efektivitas pengawasan, mendukung ketahanan pangan, dan merupakan komitmen kedua negara terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 14.

#### **d. Pertukaran Informasi, Data, dan Teknologi Kelautan**

Indonesia dan Mozambik telah menjalin hubungan diplomatik yang kuat melalui komitmen bersama dalam pengembangan potensi maritim serta penanggulangan tantangan keberlanjutan sumber daya laut global. Dalam konteks ini, pertukaran informasi dan data menjadi aspek krusial yang memperkuat kerja sama kedua negara. Indonesia, dengan posisinya sebagai negara kepulauan terbesar, berbagi keahlian dalam pemantauan perikanan, pengelolaan sumber daya laut, serta teknologi untuk meningkatkan efisiensi sektor kelautan. Di sisi lain, Mozambik turut memberikan kontribusi melalui data ekosistem dan kondisi laut di wilayah Afrika, sehingga keduanya saling memperkaya pemahaman tentang dinamika kelautan dan memperkuat strategi pengelolaan maritim yang berkelanjutan.

Implementasi konkret dari kerja sama ini diwujudkan dalam pelatihan *Workshop on Integrated Fish Information System for Mozambique*, yang membahas penerapan sistem informasi perikanan terpadu, penggunaan satelit, dan teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG). Pertukaran praktik terbaik dan pengalaman dalam program ini mendukung peningkatan pengawasan laut serta penanggulangan kejahatan maritim dengan bantuan teknologi seperti drone. Selain itu, Mozambik telah meluncurkan aplikasi *Open ArtFish* sebagai sistem data perikanan sejak 2017, yang menjadi rujukan bagi Indonesia dalam

mengembangkan teknologi serupa. Indonesia kemudian menerapkan teknologi SIG dan Data Hidro-oseanografi (DHO) untuk memetakan pola pergerakan ikan secara presisi. Kolaborasi ini mencerminkan kesiapan kedua negara dalam menghadapi era Argo Maritime 4.0, di mana digitalisasi dan teknologi berbasis data menjadi fondasi utama pengelolaan kelautan yang adaptif dan berkelanjutan.

#### **Tantangan dalam Pelaksanaan MoU Maritim Indonesia – Mozambik**

Meskipun Indonesia dan Mozambik telah menandatangani MoU *Sustainable Fisheries and Maritime Security* dan PoA untuk memperkuat kerja sama bilateral di sektor maritim, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang menghambat optimalisasi kesepakatan tersebut. Dari tujuh ruang lingkup kerja sama yang disepakati, hanya empat yang berhasil diimplementasikan, meninggalkan perencanaan tata ruang laut, pengelolaan hasil perikanan dan komersialisasi, serta konservasi laut dan ekowisata bahari sebagai area yang belum terealisasi. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur pelabuhan dan konektivitas laut yang belum memadai, yang secara langsung menghambat pemanfaatan potensi maritim, serta kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat pesisir mengenai isu-isu kemaritiman dan teknologi, yang berdampak pada efektivitas pengelolaan sumber daya laut dan konservasi.

#### **4. KESIMPULAN**

Kerja sama maritim antara Indonesia dan Mozambik merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai negara maritim sekaligus memperluas jejaring kerja sama dengan negara-negara Afrika. Melalui forum *Indonesia-Africa Maritime Dialogue* (IAMD), Indonesia menunjukkan komitmennya dalam membangun kolaborasi di sektor kelautan dan perikanan yang saling menguntungkan. Penandatanganan MoU *Sustainable Fisheries and Maritime Security* pada tahun 2018 dan penguatan melalui PoA tahun 2021 menjadi landasan utama bagi implementasi kerja sama ini. Tujuh ruang lingkup kerja sama telah disepakati, mencakup aspek SDM, perikanan berkelanjutan, IUU fishing, tata ruang laut, komersialisasi hasil perikanan, konservasi laut, dan pertukaran data dan teknologi kelautan.

Namun, hingga saat ini hanya empat dari tujuh ruang lingkup tersebut yang telah berhasil diimplementasikan, yakni peningkatan kapasitas SDM, pengembangan perikanan berkelanjutan, pemberantasan IUU *Fishing*, dan pertukaran informasi serta teknologi. Pelaksanaannya diwujudkan melalui berbagai seminar dan *workshop*. Adapun tiga ruang lingkup lainnya belum terealisasi akibat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi kemaritiman, serta perbedaan regulasi antar negara. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan strategi lanjutan yang lebih konkret agar seluruh aspek kerja sama dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan, dalam rangka mendukung penguatan sektor maritim kedua negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barrionuevo, O., Guarda, T., & Victor, J. A. 2023. Maritime Strategy and Cooperative Security. In *Developments and Advances in Defense and Security: Proceedings of MICRADS 2022* (pp. 337-345). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Duarte, R. (2012). Maritime History in Mozambique and East Africa: The Urgent Need for the Proper Study and Preservation of Endangered Underwater Cultural Heritage. *Journal of Maritime Archaeology*, 7(1), 63–86. <https://doi.org/10.1007/S11457-012-9089-6>
- Elisha, O. D. (2019). The Nigeria blue economy: prospects for economic growth and challenges. *Int J Sci Res Educ*, 12(5), 680–699.
- Hanggarini, P., Madjid, M. A., Perwita, A. A. B., & Wiranto, S. (2022). Budaya Maritim dan Diplomasi Maritim untuk Kepentingan Nasional. *Indonesian Perspective*, 7(2), 164-179. <https://doi.org/10.14710/ip.v7i2.50777>
- Handayani, P. (2016). Analisis Diplomasi Maritim Indonesia Melalui Keketuan Indonesia di Forum Regional *Indian Ocean Rim Association* (IORA) Periode 2015- 2017. Universitas Satya Negara Indonesia.
- Hidayat, M.T. (2020). Strategi Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Penolakan Kebijakan Penenggelaman Kapal Illegal Asing Pelaku IUU *Fishing* 2015-2019. Undergraduate Thesis, Upn "Veteran" Jatim.
- Madu, L. (2018). Urgensi Indian Ocean Rim Association (IORA) Dalam Diplomasi Maritim Indonesia. *Intermestic Journal of International Studies*
- Marsetio, M. (2017). Indonesian Sea Power and Regional Maritime Security Challenges. *Journal of Maritime Studies and National Integration*, 1(1), 34-46. <https://doi.org/10.14710/jmsni.v1i1.1369>
- Mary, C., Lavissière., L., Fedi. (2022). Maritime Cooperative Working Agreements. *Fachsprache*, doi: 10.24989/fs.v44i3-4.2029

- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024, 10 September). *KKP tularikan budidaya perikanan berkelanjutan ke Afrika sokong ketahanan pangan global*. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Di akses pada 3 Maret 2025, dari <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-tularikan-budidaya-perikanan-berkelanjutan-ke-afrika-sokong-ketahanan-pangan-global-WLEg.html>
- UNODC. (2021). UNODC Global Maritime Crime Programme Promotes Maritime Security in Mozambique. *United Nations Office On Drugs and Crime*. Diakses pada 27 April 2024, dari <https://www.unodc.org/southernafrica/en/aml/maritime.html>
- Utami. S.S. (2021). Kolaborasi RI-Mozambik Majukan Sektor Kelautan dan Perikanan. Diakses pada 14 Mei 2024, dari <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/8N0jyoEk-kolaborasi-ri-mozambik-majukan-sektor-kelautan-dan-perikanan>
- Agatha, T., & Rezy, F. (2023). *Indonesia-Mozambique Signs Maritime and Fisheries HR Cooperation*. Diakses pada 10 Mei 2024, dari <https://voi.id/en/economy/304845>
- Gareta, P.S., & Fardaniah, R. (2022). Kemendag Terbitkan Aturan Guna Pacu Ekspor ke Mozambik. Diakses pada 8 Mei 2024, dari <https://www.antaranews.com/berita/2926069/kemendag-terbitkan-aturan-guna-pacu-ekspor-ke-mozambik>